

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan diulas dalam dua bagian yakni kesimpulan dan saran. Pada bagian pertama (5.1), penulis akan membuat kesimpulan mengenai teori demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jürgen Habermas dan bagaimana melihat demokrasi deliberatif tersebut dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pada bagian kedua (5.2) penulis akan memberikan beberapa saran yang membangun untuk mewujudkan demokrasi deliberatif di Indonesia.

5.1 Kesimpulan

Demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jürgen Habermas merupakan suatu upaya untuk meradikalisasi kehidupan demokrasi. Pada umumnya demokrasi sering dipahami dan diprakatekkan secara minimalis. Kedaulatan rakyat terwujud hanya pada saat berlangsungnya pemilu, setelah pemilu segala kebijakan publik tersentralisasi pada kekuasaan formal. Tidak mengherankan jika hukum maupun kebijakan publik sering tidak menjawab kebutuhan masyarakat dan bersifat diskriminatif, terkhususnya terhadap kaum minoritas. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi di mana rakyatlah yang berdaulat. Habermas melalui demokrasi deliberatif berupaya untuk merevitalisasi demokrasi agar dalam praktiknya, demokrasi sungguh-sungguh mengekspresikan kedaulatan rakyat.

Menurut demokrasi deliberatif, tindakan komunikasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut. Hukum maupun kebijakan publik harus merupakan hasil kesepakatan dari tindakan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintah pun harus bersikap terbuka terhadap aspirasi dan kritikan dari masyarakat. Dengan demikian kedaulatan rakyat dapat terwujud dan hukum maupun kebijakan publik pun sungguh-sungguh mengekspresikan kepentingan rakyat.

Namun bagaimana sampai pada sebuah kesepakatan di tengah kehidupan masyarakat modern yang ditandai dengan pluralitas? Bagi Habermas masyarakat harus mengemukakan pandangan-pandangan mereka yang berbeda-beda tersebut dalam ruang publik agar diuji melalui proses diskursus publik. Dalam proses tersebut akan dinilai argumen-argumen yang dapat diuniversalisasi dan tidak mengganggu keberagaman dan argumen-argumen yang bersifat eksklusif dan karena itu tidak relevan bagi kehidupan masyarakat yang plural. Hanya argumen-argumen yang dapat diuniversalisasilah yang layak untuk dipertimbangkan demi menghasilkan kebijakan publik. Karena itu Habermas sangat menekankan argumentasi dan menolak sentimentalitas. Pendapat-pendapat yang dapat diuniversalisasi adalah pendapat yang menekankan rasionalitas sedangkan pendapat yang dirumuskan atas dasar sentimen identitas cenderung bersifat eksklusif dan menolak keberagaman.

Dalam konteks negara Indonesia, kehidupan demokrasi belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi deliberatif. Praktik-praktik deliberasi seperti yang tercermin dalam pemilu, diskusi, menulis, dan gerakan-gerakan sosial masih menemukan begitu banyak kendala. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah untuk menerima kritikan dari masyarakat, kualitas deliberasi masyarakat yang bersifat eksklusif karena dipengaruhi oleh sentimen identitas, dan ruang publik yang terkooptasi merupakan kendala-kendala hidupnya demokrasi deliberatif di Indonesia. Namun kendala-kendala deliberasi tersebut hanya dapat diminimalisasi jika masyarakat terus melakukan deliberasi. Habermas sendiri mengatakan bahwa kendala dalam proses deliberasi harus diatasi dengan deliberasi itu sendiri. Deliberasi mencerminkan kekuatan masyarakat untuk menyelesaikan segala persoalan dengan praktik komunikasi yang diskursif. Komunikasi pun merupakan solusi yang lebih bermartabat daripada tindakan-tindakan kekerasan.

Selain itu, untuk mendukung proses deliberasi di Indonesia, hemat penulis dibutuhkan juga pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat yang masih cukup kuat dipengaruhi oleh sentimen identitas membutuhkan pendidikan politik agar bisa meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Dengan demikian masyarakat Indonesia menjadi

masyarakat yang rasional yang mampu mengutamakan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan bersama. Tujuan demokrasi deliberatif untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis hanya dapat terwujud jika proses deliberasi itu sendiri mencerminkan komunikasi diskursif dan bukan komunikasi yang didasarkan sentimen.

5.2 Saran

Pada bagian ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang membangun demi menghidupkan demokrasi deliberatif di Indonesia. *Pertama*, bagi pemerintah. Pemerintah dipilih oleh rakyat karena dianggap mampu untuk memimpin masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Demokrasi deliberatif sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dihidupi pertamanya oleh pemerintah. Hidupnya demokrasi deliberatif sangat bergantung pada keterbukaan pemerintah untuk menghidupinya dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Kedua, bagi masyarakat. Demokrasi deliberatif sangat menekankan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Karena itu masyarakat Indonesia diharapkan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik di Indonesia terkhususnya dalam mengontrol kekuasaan. Selain itu, di tengah kehidupan sosial yang diwarnai dengan keberagaman. Masyarakat Indonesia diharapkan agar selalu bersikap terbuka terhadap perbedaan dan selalu mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan privat atau kelompok.

Ketiga, bagi media. dalam kehidupan masyarakat modern, media merupakan sarana perantara bagi praktik komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi dan kritik dari masyarakat sering disuarakan melalui media dan pemerintah pun menjadikan media sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan publik. Karena itu, media harus bersikap netral dan bebas kepentingan agar praktik komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tidak terdistorsi dan dapat berlangsung secara bebas dan adil.

Keempat, bagi lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Karena itu, lembaga pendidikan di Indonesia harus sedapat mungkin menerapkan metode-metode edukasi bagi masyarakat agar masyarakat dibentuk menjadi masyarakat yang rasional dan memiliki kemampuan untuk hidup dalam keberagaman. Hal tersebut sangat penting dalam mendukung kehidupan demokrasi deliberatif yang ideal di Indonesia.

Kelima, bagi partai politik. Partai politik merupakan lembaga yang didirikan untuk mewakili kepentingan masyarakat. Karena itu, dalam praktiknya partai politik seharusnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan bukan kebutuhan diri sendiri dan kelompok. Selain itu, partai politik juga bisa menjadi lembaga edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Karena itu, praktik-praktik politik yang justru memberikan pendidikan yang buruk terhadap masyarakat seperti tunduk pada kekuasaan harus sedapat mungkin dihindari. Demokrasi deliberatif akan lebih berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan jika didukung oleh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baxter, Hugh. *Habermas, The Discourse Theory of Law and Democracy*. California: Stanford University press, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Dere Beoang, Yakob. *Korelasi Antara Kualitas Pemimpin Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih*. Yogyakarta: Cerdas Pustaka, 2014.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi dan Sentimentalitas, dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama, Sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- . *Demokrasi Deliberatif, Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- . “Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jürgen Habermas.” In *Ruang Publik, Melacak “Partisipasi Demokrasi” dari Polis Sampai Cyberspace*, edited by F. Budi Hardiman, 195. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- . *Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- . *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Kedua. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Heryanto, Gun Gun. *Literasi Politik, Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2019.

- Madung, Otto Gusti. "Demokrasi dan Kebenaran." In *Demokrasi Tanpa Demos*, edited by Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang P Wiratraman, 205. Depok: Pustaka LP3ES, 2021.
- . *Negara, Agama, Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- . *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- . *Politik antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. *12 Tokoh Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Mas'oed, Mohtar, and Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjadara University Press, 1991.
- Muzaqqi, Fahrul. *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Nurhayati, Enung. "Kehidupan Berdemokrasi Urang Sunda." In *Demokrasi Di Era Digital*, edited by Nasir Tamara, 468–69. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Power, Thomas, and Eve Warburton. *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi? ISEAS*. Jakarta, 2021.
- Seran, Alexander. *Teori Hukum Positif dalam Perspektif Etika Diskursus Jürgen Habermas*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma jaya, 2011.
- Watimena, Reza A.A. *Demokrasi, Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.
- Will Kymlicka. "Pendidikan Kewarga negaraan." In *Kewarganegaraan Demokratis, dalam Sorotan Filsafat Politik*, edited by Felix Baghi, 237. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

Jurnal

Asy'ari Muthhar, Moh. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia." *USHULUNA* 2, no. 2 (2016): 54. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>.

Carmo, Gisleine do, José Roberto Pereira, Vânia Aparecida Rezende, and Luiz Flávio Felizardo. "Participatory Budgeting and the Formation of Public Spheres." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 10 (September 9, 2024): 742. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-023>.

Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri. "Gerakan Sosial Islam di antara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme." *Mahkamah* 3, no. 1 (2018): 129. <https://doi.org/10.25217/jm.v3i1.252>.

Hardiman, Fransisco Budi. "Pakta Setan Dalam Politik Kant Tentang Politik dan Moral dalam Negara Modern." *Jurnal Ledalero* VI, no. 2 (2024): 90. <https://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/598>.

Hutabarat, Erikson JP, Lamhot Naibaho, dan Djoys Annkene Rantung. "Memahami Peran Pendidikan di Era Post Modern Melalui Pandangan John Dewey." *Kolaboratif Sains* 6, no. 11 (2023): 1575. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4403>.

Ida, Laode. "Muslim Sects in Indonesia and the Emergence of Intolerance." *Journal of Social, Political, and Economic Studies* 40, no. 1–2 (2015): 6. <https://www.proquest.com/docview/1672861297/fulltext/ED91E637A7A5430DPQ/55?accountid=215812&sourcetype=Scholarly Journals>.

Ilbasmiş, Violeta Stratan. "A Theoretical Approach to the Public Space Concept Evolution: From Habermas to Internet, Big Data and Social Media." *New Media and Social Communication* 12, no. 3 (2022): 181. <https://www.proquest.com/docview/2732612467/fulltext/6DFD69ED15FD4773PQ/2?accountid=215812&sourcetype=Scholarly Journals>.

Iwan, and Mohammad Asy'ari Muthhar. "Menelaah Teori Kritis Jürgen

Habermas.” *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 3, no. 2 (2014).
<http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/view/360>.

Kodoati, Michael Carlos, and Serepina Tiur Maida. “Defisit Kritis Media Massa: Menimbang Kebutuhan Akan Regulasi Diri Media Massa berdasarkan Pemikiran Jürgen Habermas.” *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): 33.
<https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3534>.

Kusmanto, Heri. “Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik UMA* 1, no. 1 (2013): 45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.550>.

Lewar, Paulus Pati, dan Otto Gusti Ndegong Madung. “Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas.” *Jurnal Ledalero* 21, no. 2 (2022): 152. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>.

Luthfi, Muhamad, Rusydan Fathy, dan Mohamad Faisal Asadi. “GNPF MUI: Strategi Pembimbingan dan Keberhasilan Gerakan Populis Islam di Indonesia.” *Asketik* 3, no. 1 (2019): 31. <https://doi.org/10.30762/ask.v3i1.1180>.

M. Ied Al Munir. “Dari Kritis ke Tindakan Komunikatif (Kritik Jürgen Habermas Terhadap Modernitas Dan Rasionalitas).” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 19, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1320>.

Noor, Firman. “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia.” *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2016)

Sastrawati, Nila. “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 193. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>.

Shahzad, Asad, and Irfan Muhamad. “Iqbal’s Spiritual Democracy and Habermas’S

Deliberative Democracy: A Comparative Study.” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14, no. 1 (2024): 147. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.09>.

Sukma, Fadjar, and Saparuli. “Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia.” *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 146. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.47>.

Susanto, Rahkasiwi Dimas, and Irwansyah. “Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca-Reformasi.” *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.

Ummah, Sun Choirol. “Dialektika Agama dan Negara dalam Karya Jürgen Habermas.” *Humanika* 16, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21831/hum.v16i1.12140>.

Majalah

Adyatama, Egi, and dkk. “Main Aparat Menjelang Pemilu.” *Tempo*, Jakarta, 2023.

Cahyani Sunudyantoro, Dewi Rina, and dkk. “Mereka yang Tak Lelah Melawan.” *Tempo*, Jakarta, 2024.

Hardiman, Budi. “Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto.” *Basis*, Yogyakarta, 2004

Hermawan, Erwan, and dkk. “Duit Besar, Glorifikasi Jokowi.” *Tempo*, Jakarta, 2024.

Joko Suyono, Seno, and Ihsan Reliubun. “Blunder Galeri Nasional dan Perlawanan Yos.” *Tempo*, Jakarta, 2025

Internet

Haryatmoko. “Disrupsi Digital Ubah Pembelajaran dan Pola Pikir Pendidik.” *Kompas*, 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/13/disrupsi-digital-ubah-pembelajaran-dan-pola-pikir-pendidik>.

Kemp, Simon. "Digital 2024: Indonesia." DataReportal, 2024.
<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

Pati Herin, Fransiskus. "Bawalsu NTT: 108 TPS Rawan Politik Uang dan 119 Rawan Kekerasan." Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/bawaslu-ntt-108-tps-rawan-politik-uang-145-rawan-intimidasi-dan-119-rawan-kekerasan>.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "CSIS Beberkan Masalah UU TNI: Kurang Transparan dan Tumpang-Tindih." detiknews, 2025.
<https://news.detik.com/berita/d-7840404/csis-beberkan-masalah-uu-tni-kurang-transparan-dan-tumpang-tindih>.

Rizki Astuti, Nur Azizah, dan Tsarina Maharani. "Resmi! DPR Sahkan Revisi UU KPK Ditolak Habis-Habisan." Detiknews, 2019.
<https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu-kpk-meski-ditolak-habis-habisan>.

Wicaksono, Adhi. "Pakar: Politik Uang di Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia." CNN Indonesia, 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129203437-32-1030744/pakar-politik-uang-di-indonesia-tertinggi-ketiga-di-dunia>.

Manuskrip

Madung, Otto Gusti. "Kritik di Negara Demokrasi: Demokrasi dan Kebenaran." Diskusi Ke 20 Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik LP3ES. Maumere, 2021.